

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KOTA MANADO
(STUDI KASUS PADA SKPD KECAMATAN MALALAYANG)**

*RECORDING ANALYSIS AND REGIONAL REPORTING EXPENDITURE
AT REGIONAL WORKING UNITS (SKPD) IN MANADO CITY GOVERNMENT
(CASE STUDY ON SKPD SUBDISTRICT MALALAYANG)*

Oleh:

Elicia E.D Kasenda¹

Herman Karamoy²

Treesje Runtu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹eliciakasenda@gmail.com

²karamoy_herman@yahoo.com

³truntu@gmail.com

ABSTRAK: Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, karena hal ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan pemerintah daerah khususnya. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado Kecamatan Malalayang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado telah melakukan pencatatan akuntansi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Saran bagi SKPD Kecamatan Malalayang yaitu untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah tetap berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada.

Kata Kunci : Belanja daerah, Akuntansi, Laporan Keuangan, Keuangan daerah.

ABSTRACT: Regional expenditures is an important part of the local administration system, because it is associated with a system of financial accountability of state and government in particular areas. Regional expenditures include all expenditures from general treasury account areas that reduce equity fund. The purpose of this study to determine the recording and reporting of accounting regional expenditures in the Work Units (SKPD) Manado City districts Malalayang has been conducted in accordance with the Minister of interior No. 21 of 2011 on Regional Financial Management Guidelines as a reference. The Method used is a qualitative method. The results showed the SKPD Malalayang District of Manado City has done its accounting records in accordance with the regional expenditures Minister Regulation No. 21 of 2011 on Regional Financial Management Guidelines. Advice for SKPD Malalayang District of Manado City in the area of financial management remain guided entirely to existing regulations.

Keywords: Regional Expenditures, Accounting, Financial Statement, Local Financial.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, karena hal ini terkait dengan sistem pertanggung jawaban keuangan negara dan pemerintah daerah khususnya. Menurut pasal 289 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi keuangan yang meliputi aset, utang dan ekuitas dana yang berada dibawah tanggung jawabnya. Sedangkan untuk tingkat kantor dan/atau satuan kerja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi/pertanggung jawaban/pelaporan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan kantor atau SKPD terkait.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja daerah di SKPD Kota Manado Kecamatan Malalayang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Mardiasmo (2014: 1), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya. Sedangkan menurut Novi (2013: 1), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Sebagai langkah awal dalam menjalankan proses akuntansi adalah mengenali sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan. Sistem informasi yang dimaksud meliputi sekumpulan sumber daya yang dirancang sedemikian rupa untuk mengubah data menjadi informasi atau seperangkat prosedur formal yang berguna untuk mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada pemakai (Sitepu, 2015).

Sistem akuntansi mempertahankan dan mereproduksi informasi keuangan yang berkaitan dengan arus transaksi keuangan dan posisi keuangan yang ada (Rahamon, Adejare, 2014). Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam bentuk laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sugijanto dalam (Halim, 2007:75), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*government accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (Mewengkang, 2016).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Rantung, 2013).

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa pengambilan keputusan, ketika seseorang mampu dan menguasai bahasa ini, maka aspek keuangan dalam kehidupannya juga semakin baik. Akuntansi dipandang dari 2 (dua) perspektif, maka akuntansi didefinisikan ke dalam sudut pandang yaitu pandang pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatan yang terjadi. Sudut pandang pertama mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang memberikan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan kegiatan secara efisien dan menilai kembali kegiatan yang telah terjadi dari sebuah entitas atau transaksi yang terkait dengan aktivitas finansial. (Albertus Indratno, 2013:5).

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda (Halim, 2007:84). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

AKUNTANSI PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan kerja tersebut (Simbolon, 2016). Sesuai definisi dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011, yang dimaksud dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam uraian berikutnya menyangkut akuntansi di SKPD, SKPD dapat terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, yang termasuk dalam kategori pencatatan di SKPD adalah fungsi SKPKD sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di SKPD tersebut oleh sekretariat. Bukan sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda. Untuk fungsi yang mewakili transaksi Pemda dilakukan oleh PPKD sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan.

Struktur akuntansi untuk Pemda menggunakan struktur akuntansi Pusat-Cabang. Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di SKPD adalah sebagai akuntansi cabang (Branch Office). Konsekuensi dari akuntansi Pusat-Cabang ini adalah adanya akun resiprokal (reciprocal account) yaitu RK-PPKD (yang ada di SKPD) di kelompok ekuitas dana, dan RK-SKPD (yang ada di PPKD) di kelompok aset. Dari kedua bagian sistem tadi, pada akhir periode laporan-laporan yang dihasilkan akan digabungkan untuk menjadi laporan entitas yang terjadi dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK. Empat laporan itu akan menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada lembaga legislatif mewakili rakyat.

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan merupakan bagian dari input (dokumen), peringkasan kejadian keuangan merupakan bagian dari proses (catatan), hingga pelaporan keuangan merupakan bagian dari output hal ini dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD (Halim, Restianto, Karman, 2010: 101).

Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 "Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih."

Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PKK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Transaksi belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

- a. Mekanisme UP/GU/TU
- b. Mekanisme SP2D LS

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyangkut Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Daerah yang dijadikan acuan dalam menyusun penelitian ini yang dilakukan oleh Fauziah (2011) Sari (2011) dan Mansoara (2013) memiliki hasil penelitian dan kesimpulan yang sama yaitu telah sesuai dengan peraturan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

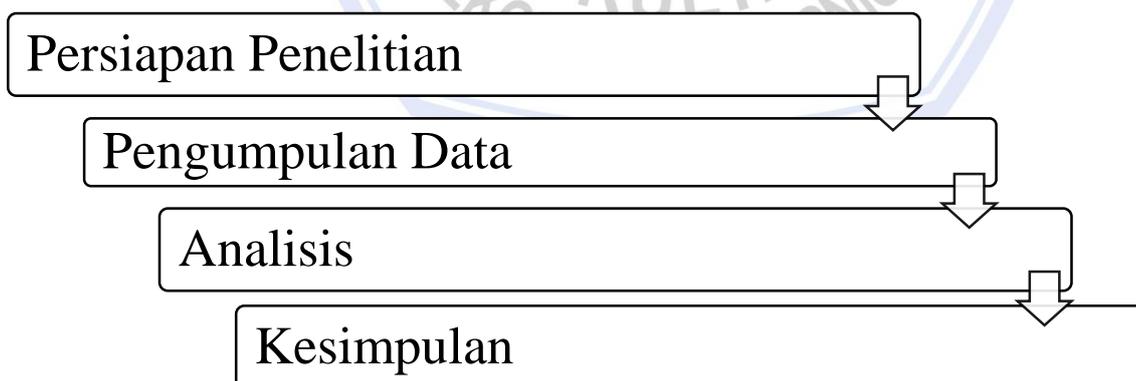
Jenis studi yang dipakai adalah studi deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung pada 1 Juni 2016 s.d selesai yang dilakukan di Kota Manado Kecamatan Malalayang.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini digambarkan dalam bentuk Diagram Alur Penelitian berikut ini:



Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, Supomo, 2012:147). Penelitian ini diambil di Kantor Camat Malalayang Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data di Kantor Camat Malalayang Kota Manado, penulis memilih teknik pengumpulan data arsip dengan menggunakan teknik pengumpulan data di basis data untuk mendapatkan data primer.

Data Sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan diperoleh melalui penelusuran secara manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro, Supomo, 2012:146).

Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif, di mana metode ini membahas suatu permasalahan secara terperinci dengan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Singkat

Kecamatan Malalayang terletak di bagian selatan kota Manado. Luas wilayahnya berdasarkan data BPS Manado tahun 2015 adalah 2975 Ha dan memiliki jumlah penduduk 56344 jiwa. Nama Kecamatan Malalayang diambil dari kata melayang-layang.

Kecamatan Malalayang terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, yaitu: kelurahan Malalayang I (900 Ha), Malalayang II (700 Ha), Malalayang I Barat (677 Ha), Malalayang I Timur (272 Ha), Winangun I (155 Ha), Winangun II (57 Ha), Bahu (87,50 Ha), Kleak (60,40 Ha) dan Kelurahan Batukota.

Hasil penelitian

Jurnal

Jurnal bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-SKPD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)

Berikut adalah jurnal akuntansi belanja (pengeluaran kas) yang terjadi pada SKPD Kecamatan Malalayang:

1. Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) / Tambahan Uang (TU).

Berdasarkan dokumen sumber yakni mulai dari SPP-UP yang terdiri dari Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Surat Pengantar SPP-UP, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Perintah Membayar (SPM) sampai PPK-SKPD akan mencatat transaksi tersebut dalam Jurnal Penerimaan Kas.

Jurnal Penerimaan Kas dibuat oleh PPK-SKPD per bulan dengan memperlihatkan rekening kas di Bendahara Pengeluaran di debet serta no rekening, tanggal terjadinya transaksi, no bukti, R/K PPKD sebagai rekening yang di kredit, jumlah dana yang diterima serta akumulasinya dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir tiap bulan.

Secara berkala PPK-SKPD akan menerima SPJ dari bendahara pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi atas pemakaian Uang Persediaan, maka berdasarkan SPJ dan bukti transaksi yang

diterimanya PPK-SKPD akan mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas dengan Uang Muka Operasional di debet dan Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai di Kredit.

Jurnal ini hanya menggambarkan bahwa telah terjadi pengurangan kas tunai pada bendahara pengeluaran yang dipakai untuk keperluan uang muka operasional. Sedangkan untuk rekening-rekening belanja yang dibebankan akibat pemakaian Uang Persediaan tersebut akan dicatat kedalam jurnal umum oleh PPK-SKPD setelah SP2D untuk Ganti Uang Persediaan (SP2D-GU) telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD dengan Rekening Belanja di debet dan Uang Muka Operasional di kredit.

Untuk mengisi kembali Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai yang telah di SPJ-kan, maka Bendahara Pengeluaran akan membuat permintaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).

Uang persediaan yang telah dibelanjakan akan diisi kembali dengan mengajukan SPP-GU dan SPM-GU dan PPKD selaku BUD akan menerbitkan SP2D-GU. Jika dana yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan belanja organisasi maka Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP-TU dan SPM-TU.

SPJ yang dibuat oleh bendahara pengeluaran juga dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja Fungsional) dan Buku Kas Umum (BKU). SPJ-Belanja Fungsional menggambarkan:

- a. SPJ-LS Gaji sampai dengan bulan lalu, bulan ini dan sampai dengan bulan ini.
- b. SPJ-LS Barang dan Jasa sampai dengan bulan lalu, bulan ini dan sampai dengan bulan ini.
- c. SPJ-UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu, bulan ini dan sampai dengan bulan ini.

Sedangkan Buku Kas Umum menggambarkan jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo dana pada bendahara pengeluaran.

2. Akuntansi Belanja Langsung

Untuk pencatatan berdasarkan SP2D-LS untuk belanja barang dan jasa PPK-SKPD mencatatnya pada jurnal umum dengan mendebet rekening belanja dan mengkredit rekening R/K PPKD.

3. Akuntansi Aset

Belanja modal dilakukan dengan mengajukan SPP-LS dan SPM-LS untuk pengadaan aset tetap. Berdasarkan SP2D-LS, PPK-SKPD akan mencatat belanjanya ke dalam jurnal umum sedangkan pencatatan pengeluaran kasnya dilakukan oleh PPKD, untuk pengakuan terhadap aset tetapnya maka dibuat jurnal korolasi yang dicatat dalam jurnal Umum-Korolasi.

Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku besar, maka langkah selanjutnya PPK-SKPD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-SKPD adalah untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi maupun untuk mencatat sisa barang persediaan dari tahun bersangkutan.

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka perkiraan tersebut dimasukkan dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian. Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah oleh PPK-SKPD tetapi dibuat dalam neraca lajur, dan dari neraca lajur tersebutlah PPK-SKPD menyusun Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan

Langkah selanjutnya PPK-SKPD akan menyiapkan Laporan Keuangan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK-SKPD Kecamatan Malalayang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian dari masing-masing laporan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Malalayang tahun anggaran 2015 hanya berupa Belanja. Total realisasi belanja untuk tahun 2015 adalah Rp. 10.142.292.602,00 dari total belanja yang dianggarkan pada tahun tersebut sebesar Rp. 11.371.580.600,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

b. Neraca

Neraca SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Malalayang sebesar Rp. 13.199.488.600,00. Kewajiban dan Ekuitas Dana yang dimiliki adalah sebesar Rp. 13.199.488.600,00.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian, Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado Tahun Anggaran 2015 menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado
2. Kebijakan akuntansi pada SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado
3. Penjelasan pos-pos keuangan
4. Penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.

Jurnal Penutup

Setelah menyusun laporan keuangan tahunan, maka PPK-SKPD membuat jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup saldo perkiraan nominal supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya. Jurnal penutup yang dibuat oleh PPK-SKPD berupa jurnal untuk menutup rekening penerimaan dan pengeluaran PFK, jurnal untuk menutup rekening belanja dan jurnal untuk menutup perkiraan surplus/defisit.

Pembahasan**Penerapan Akuntansi Belanja**

Pencatatan Belanja pada SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun untuk belanja LS-Gagi dan Tunjangan dan Belanja LS-Barang dan Jasa.

SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam Buku Jurnal, posting ke Buku Besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, menyusun Laporan Keuangan serta membuat Jurnal Penutup.

SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado juga sudah menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan Akuntansi Aset

Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap. Akuntansi Aset pada SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis Pelaporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
- b. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado telah melakukan pencatatan akuntansi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah tetap berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.
2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Kecamatan Malalayang Kota Manado yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai mengenai akuntansi pemerintahan daerah.
3. Bagi peneli selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mencakup sistem akuntansi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, Indratno, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi*. Jakarta, Indonesia: Dunia Cerdas.
- Anggriani, Yunita., Puranta, Hendra, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif* (1sted). Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Fauziah, 2011. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DI Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)*. Padang: Universitas Andalas.
- Halim, A, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. (1sted.). Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, Abdul., Iqbal, Muhammad, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rded.). Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul., Restiano, Yanuar E., Karman, I Wayan, 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (1sted.). Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Indriantoro, N., Supomo, B, 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo, 2014. *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Cetakan keempat. BPFE, Yogyakarta.

- Mansoara, N, 2013. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Kecamatan Bunaken)*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013, Hal 813-820.
- Mewengkang, Julia, 2016. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)*. Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 817-825.
- Novi, Priyati, 2013. *Pengantar Akuntansi*. PT Indeks, Jakarta. *PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2011. Jakarta, Indonesia: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rahamon, O., & Adejare, A, 2014. *The Analysis Of The Impact Of Accounting Records Keeping On The Performance Of The Small Scale Enterprises*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, January 2014, Vol.4, No.1, ISSN: 2222-6990.
- Rantung, Veronica, 2013. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Dinas Perhubungan Kota Manado*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 583-590.
- Sari, Winda, Puspita, 2011. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Sitepu, Estephany, 2015. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 299-305.
- Simbolon, Rumondang, 2016. *Analisis Pencatatan Belanja Modal Pada Kantor Regional XI Badan epegawaian Negara Manado*. Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1442-1449.